

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis STASIUN PPMHKP PONTIANAK

Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BPPMHKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atas dasar SK Kepala BPPMHKP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran dan Barang Wilayah Dilingkungan BPPMHKP, Satker Stasiun PPMHKP Pontianak adalah entitas akuntansi di bawah BPPMHKP yang ditunjuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Kalimantan Barat. Stasiun PPMHKP Pontianak dituntut untuk melaksanakan tugas secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas adalah menjamin mutu produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan aman dikonsumsi.

Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP Pontianak Tahun Anggaran 2025 terdiri dari dua entitas satker. Satker Stasiun PPMHKP Pontianak memiliki anak satker yaitu Balai PPMHKP Entikong dimana satker tersebut menjadi anak satker karena menjadi satker inaktif yang asset dan operasionalnya berada di DIPA Stasiun PPMHKP Pontianak Tahun Anggaran 2025

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PPMHKP Pontianak. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Stasiun PPMHKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun PPMHKP Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TW III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PPMHKP Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

	kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP Pontianak adalah sebagai berikut:
<i>Pendapatan- LRA</i>	(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). • Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan LO</i>	(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
<i>Belanja</i>	(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	(4) Beban • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
- Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya	4 tahun
--------------------	---------

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun
-------------------------------	----------

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban
 Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajibanban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas
 Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Stasiun PPMHKP Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.976.538.000, Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	141.100.000	141.100.000
Jumlah Pendapatan	141.100.000	141.100.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.490.112.000,	4.276.892.000
Belanja Barang	3.583.075.000,	3.651.769.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	8.073.187.000	7.928.661.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp.
141.593.819

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 141.593.819 atau mencapai 38 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 141.100.000. Pendapatan Satuan Kerja Stasiun PPMHKP Pontianak terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	141.100.000	141.400.000	100.20
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		193,819	

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		0	
Jumlah	141.000.000	141.593.819	100.21

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp 7.486.339.463

Realisasi Belanja TA 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.486.339.463 atau 94.40% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.928.661.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.276.892.000	4.191.268.201	98.00
Belanja Barang	3.651.769.000	3.295.071.262	90,20
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	7.928.661.000	7.486.339.463	94.40
Pengembalian Belanja Pegawai	-	0	-
Pengembalian Belanja Barang		0	
Jumlah	7.928.661.000	7.486.339.463	94.40

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 4.191.268.201,

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.191.268.201 dan Rp. 2.688.060.723, Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami Kenaikan dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan Personil CPNS BPPMHKP Entikong 2 Orang
2. Pengalihan pembayaran Gaji dari BPPMHKP Entikong sebanyak 4 orang PNS dan 20 Orang PPPK

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 3.295.071.262

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.295.071.262, dan Rp 2.497.795.800 Realisasi Belanja Barang TA 2025

mengalami Kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2024 dikarenakan terdapat belanja barang dari satker BPPMHKP Entikong

Belanja Modal Rp. 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami Penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan karena pada tahun 2024 Stasiun PPMHKP Pontianak tidak mendapatkan pagu belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d.
31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
00	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		0	97

Belanja Modal Tanah Rp .0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Tidak ada belanja Tanah sepanjang tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar Hal ini disebabkan pada tahun 2024 Stasiun PPMHKP Pontianak tidak mendapatkan pagu belanja modal.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2024	%
Sarana Layanan Perkarantinaaan	0	0	0
Alat Pengolah Data	0	0	
Meubelaire	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	97
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2024	%
Renovasi Gedung Kantor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0..

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0.

Aset Lancar Rp.
273.363.444

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun PPMHKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 273.363.444 dan Rp 29.937.275.
Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PPMHKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 8100125675381000	0	0
Jumlah	0	0

Rincian Setoran Pengembalian Sisa UP dan TUP

1. Setoran Saldo kas Tunai TUP Nihil 31 Desember 2025
Rp. 90.028.287, NTPN F77DE45KT3S0JRGQ
2. Setoran Saldo Kas Bank TUP Nihil 31 Desember 2025
Rp. 511.364 NTPN 45AE71GCDK4RCRBD
3. Setoran Saldo Kas Tunai UP Nihil 31 Desember 2025
Rp 478.800 NTPN C1BAE6QTCJIINDSJ

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0, Stasiun PPMHKP Pontianak memberlakukan pembayaran PNBP secara *cashless* sehingga tidak memiliki rekening penampungan dan saldo kas pada bendahara penerimaan

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Stasiun PPMHKP

Pontianak terdapat saldo setara kas dengan rincian sebagai berikut

Piutang Bukan Pajak
Rp. 533.710

C.1.4. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 533.710 dan Rp. 192.850

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2024
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	533.710	192.850
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang lainnya merupakan pengembalian atas kelbihan bayar dari tunjangan kinerja PNS, PPPK dan Uang Makan PNS Bulan Desember 2025 adapun rinciannya sebagai Berikut

TABEL RINCIAN PENGEMBALIAN TUNJANGAN KINERJA PNS		
TUNJANGAN KINERJA PPPK dan UANG MAKAN PNS		
31 DESEMBER 2025		
No	Nama	Jumlah
Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS		
1	Jimmy Yonathan Elwaren, S.St.Pi	89.064
2	Isnani Syafarini, S.Pd	27.146
3	Aris Sugiarto, S.Pi	67.685
4	R. Gilang Rahmanto, S. Akun	62.041
5	Hasti Prita Novriani, A.Md	17.622
6	Suyatno, S.Pi	18.092
7	Ari Wahyuningsih, A.Md	15.797
8	Febriana Widyanti, A.Md	16.288
9	Hamka	106.815
10	Hartono, A.Md	32.155
Jumlah Pengembalian Tukin PNS		452.705
Pengembalian Tunjangan Kinerja PPPK		
1	Michelson Febrianto, A.Md	15.797
2	Rifki Abdul Halim	28.208
Jumlah Pengembalian Tukin PPK		44.005
Pengembalian Uang Makan PNS		
1	Hamka	37.000
Jumlah Pengembalian Uang Makan PNS		37.000
Total Piutang		533.710

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31

Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2021
1.		0	-
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	-
6.		0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp.0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.
Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker
disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2021
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		-	
	Jumlah		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp. 2.669

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Pendek**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Stasiun PPMHKP
Pontianak per 31 Desember 2025 2025 dan 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp 2.699 dan Rp 969, yang
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka
Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing
piutang masing-masing debitur.
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan
kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai
berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	533.710	0,5%	2.699
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet	-	100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

Beban Dibayar di Muka
Rp . 18,202,067

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 18,202,067 dan Rp. 0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	18,202,067	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Wilker	0	0
Jumlah		

Saldo beban bayar dimuka merupakan saldo langganan starlink satker BPPMHKP Entikong selama satu tahun terhitung mulai tanggal 2 Desember 2025 s.d 1 Desember 2025 Senilai Rp. 19.856.800,- dengan beban yang digunakan selama tahun 2025 adalah 1 bulan sebesar Rp. 1.654.733. jadi masih tersisa beban bayar dimuka selama 11 bulan dengan nilai Rp. 18.202.067

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp. 0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2024 dan 2024
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah		

Persediaan

Rp 254,630,336

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 254,630,336 dan Rp 29,937,275 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	17,156,296	9.635.375
Bahan Baku	237,474,040	20.301.900
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	254,630,336	29.937.275

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Pada Tanggal 31 Desember 2025 telah dilaksanakan Inventarisasi Persediaan. Dan Telah diterbitkan BA Hasil Inventarisasi sebagai berikut :

1. B. 1012/SKIPM.PNK/PL.760/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025,

Aset Tetap

Rp 18,616,162,070

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 18,616,162,070 dan Rp 10,795,922,001.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun PPMHKP Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp. 7,817,715,120

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Stasiun PPMHKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7,817,715,120 dan Rp 6,282,017,000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	6,282,017,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	1.535.698.120
Mutasi Kurang:	
	0
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	7.817.715.120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	7.817.715.120

Kenaikan Nilai Tanah dikarenakan penyerahan asset Tanah dari Balai PPMHKP Entikong yang menjadi anak satker Stasiun PPMHKP Pontianak Senilai Rp. 1.535.698.120 yang tertuang dalam BA No. B. 32/BPPMHKP.ETK/PL.510/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Peralatan dan Mesin
Rp. 8,340,565,520

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Stasiun PPMHKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 8,340,565,520 dan Rp. 4.289.080.696
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	4.289.080.696
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	
Transfer Masuk	4.051.484.824,
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghapusan Aset	0
Pengalihan Aset Ke Balai KHIT Kalbar	0
Saldo Per 31 Desember 2025	8.461.799.820
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(7.931.232.257)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	530.567.563

Kenaikan Nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong yang menjadi anak satker Stasiun PPMHKP Pontianak Senilai Rp. 4.051.484.824 yang tertuang dalam BA No. B. 32/BPPMHKP.ETK/PL.510/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Gedung dan Bangunan

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Rp 11.673.420.090

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 11.673.420.090 dan Rp 4.799.029.983
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	4.799.029.983
Mutasi tambah:	
Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong	6,898,140,107
Mutasi Kurang:	-
0	0
Saldo Per 31 Desember 2025	11.673.420.090
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.766.227.849)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	9.907.192.241

Kenaikan Nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong yang menjadi anak satker Stasiun PPMHKP Pontianak Senilai Rp. 6,898,140,107 yang tertuang dalam BA No. B. 32/BPPMHKP.ETK/PL.510/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 1,312,073,000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,312,073,000 dan Rp 379.944.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	379.944.000
Mutasi tambah:	
Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	932.129.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(671.297.020,)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	640.775.980

Kenaikan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong yang menjadi anak satker Stasiun PPMHKP Pontianak Senilai Rp. 932.129.000 yang tertuang dalam BA No. B. 32/BPPMHKP.ETK/PL.510/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Aset Tetap Lainnya
Rp. 138,196,000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 138.196.000 dan Rp 38.082.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	38.082.000
Mutasi tambah:	
Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong	100.114.000-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2025	138.196.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2024	0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	138.196.000

Kenaikan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan Transfer masuk dari Balai PPMHKP Entikong yang menjadi anak satker Stasiun PPMHKP Pontianak Senilai Rp. 138.196.000 yang tertuang dalam BA No. B. 32/BPPMHKP.ETK/PL.510/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. – 10,665,807,660

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.665.807.660 dan Rp 4.992.231.678.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka
Panjang
Rp 0

C.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Stasiun PPMHKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Stasiun PPMHKP Pontianak merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp 0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Stasiun PPMHKP Pontianak per 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2021
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah		

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp 0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2021
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2024
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

Aset Lainnya
Rp 0

C.4. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0.
Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada STASIUN PPMHKP PONTIANAKberupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 31 Desember 2025	

Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	
Nilai Buku Per 30 Desember 2025	

Mutasi tambah:
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Penatausahaan PNPB	0
2.	Aplikasi Akuntansi Terpadu	0
	Jumlah	

Aset Lain-Lain
Rp 0

C.4.2. Aset Lain-lain
Aset Lain-lain per 30 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun PPMHKP Pontianak. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo Per 30 Desember 2024	0
Amortisasi s.d. 30 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 30 Desember 2024	0

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Desember 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp. 15.600.929

C.5. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 15.600.929 dan Rp 20.373.105

Uang Muka dari KPPN
Rp 0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 15.600.929

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 15.600.929 dan Rp 20.373.105. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Langganan Bulan Desember 2025	12.250.415
2	Beban Langganan Telpon Bulan Desember 2025	45.624
3	Beban langganan Internet Bulan Desember 2025	2.413.590
4	Beban langganan PDAM Desember 2025	891.300
	Total	15.600.929

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp. 0

C.5.3. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya merupakan saldo PPH 21 atas honorarium Operasional Satker yang sudah dipungut namun belum disetorkan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
0	0

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp 0

C.5.4. Utang Yang Belum ditagihkan
Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp0, merupakan Jumlah kuitansi uang persediaan yg belum di SPM kan:

Ekuitas
Rp 18.873.924.585

C.7 Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 18.873.924.585 dan Rp 10.805.679.021. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 141.400.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 141.400.000 dan Rp. 159.750.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	141.400.000	159.750.000	(11,87)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	0	0
Pendapatan Lain-lain		0	0
Jumlah	141.400.000	159.750.000	(11,87)

Jumlah pendapatan PNB tahun 2025 turun sebesar 11,87% dikarena sudah tidak diberlakukannya lagi pengujian organoleptik lapangan setiap penerbita sertifikat SMKHP

Beban Pegawai
Rp 4.190.734.491

D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.190.734.491 dan Rp 2.687.866.904. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.077.968.460
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.408
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.802.880
511122	Beban Tunj. Anak PNS	26.508.824
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22.680.000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	26.840.000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	7.889.358
511126	Beban Tunj. Beras PNS	60.434.490
511129	Beban Uang Makan PNS	170.928.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	36.755.000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	270.166.633
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.716
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	18.879.480
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.297.650
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12.120.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15.413.390
511628	Beban Uang Makan PPPK	62.467.000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	9.285.000
512211	Beban Uang Lembur	359.333.000
512212	Beban Uang Lembur PPPK	85.353.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.509.543.330
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	344.048.872
JUMLAH		4.190.734.491

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp. 160.655.863

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 160.655.863 dan Rp 314.626.440. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024

(dalam Rupiah)		
Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	126.444.358,
593131	Beban Persediaan bahan baku	34.211.505,
JUMLAH		160.655.863,00

Beban Barang dan
Jasa
Rp
2.030.927.763

D.4 Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.030.927.763 dan Rp. 1.377.246.878 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025

(dalam Rupiah)		
Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	792.783.283,00
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	47.794.100,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78.220.000,00
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	146.071.500,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.360.000,00
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	46.419.000
522111	Beban Langganan Listrik	146.422.948
522112	Beban Langganan Telepon	1.405.401
522113	Beban Langganan Air	11.397.800
522141	Beban Sewa	20.000.000
522191	Beban Jasa Lainnya	739.053.731
JUMLAH		2.030.927.763,00

Beban
Pemeliharaan Rp.
791.410.713

D.5 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 791.410.713 dan Rp 428.465.676. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025

(dalam Rupiah)		
Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	367.360.666
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418.784.233
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.515.814
593114	Beban Persediaan suku cadang	3.750.000
JUMLAH		791.410.713

Beban Perjalanan Dinas
Rp 94.609.123

D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 94.609.123 dan Rp 386.512.270. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanannya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	88.609.123,00
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	
	Total	94.609.123,00

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Rp 0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2021	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial
Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	
Jumlah Beban			

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp
550.455.497

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 550.455.497 dan Rp 758.617.282 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.289.328,
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	253.778.660,
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	84.498.194,
591312	Beban Penyusutan Irigasi	2.490.625,
591313	Beban Penyusutan Jaringan	9.398.690,
JUMLAH		550.455.497

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 . Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional
Rp 0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan penjualan asset non lancar		2.876.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(693.750)	0
Pendapatan Kegiatan Non Operasional lainnya		15.942.700	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.287.395		
Jumlah Beban	3.287.395	18.124.950	

Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan beban atas penghapusan sertifikat KID1

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
10,805,679,021

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 10,805,679,021 dan Rp 12,048,214,533

Defisit LO
Rp.
7.680.683.514

E.2. Surplus/Defisit-LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp 7.680.683.514) dan (Rp. 5.310.657.762). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi
Aset Rp. 0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Jl. Salak No. 111, Bogor.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi Rp
0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	

Jumlah	

Koreksi Lain-lain
Rp. 969

E.4.5. Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 969 dan Rp 1969
Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	969
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	969

Transaksi Antar
Entitas Rp.
15.495.523.146

E.5. Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 15.495.523.146 dan Rp 4.068.120.281. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas Sampai Dengan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.486.339.463	5.185.856.523
313121	Diterima dari Entitas Lain	- 141.593.819	- 178.962.580
313211	Transfer Keluar	-	- 942.682.537
313221	Transfer Masuk	8.150.777.502	3.908.875
JUMLAH		15.495.523.146	4.068.120.281

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).
Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp 141.539.819 sedangkan DKEL sebesar Rp 7.468.339.463.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Qty	Nilai
1.	Bahan Laboratorium	Tranfer Masuk Laboratorium dari BUSPPMHKP dengan Nomor BAST B153/BUSPPMHKP/KI140/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 sebanyak 7 item	7	18.831.645
2.	Sertifikat Kode H	1. Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP dengan nomor BAST :26/BPPMHKP/PL.520/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025 (Kode H.150 eksemplar) 2. BAST NO. 2895/BPPMHKP/PL.520/VI/2025 Tanggal 31 Desember 2025 (Kode H 100 eksemplar)	250	1.835.100
3.	Sertifikat Kode A	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 1115/BPPMHKP/PL.520/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025	10	72.700
4.	Sertifikat Kode B	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 1115/BPPMHKP/PL.520/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025	10	145.960
5.	Sertifikat Kode E	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 1115/BPPMHKP/PL.520/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025	5	36.350
6.	Sertifikat Kode G	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 1115/BPPMHKP/PL	10	72.700

		.520/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025		
7	Sertifikat Kode E	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 87/BPPMHKP/PL.5 20/II/2025 Tanggal 28 Pebruari 2025 (kode E.100 eksemplar)	100	665.000
8	Serah terima asset dari BPPMHKP Entikong	BAST Aset BPPMHKP Entikong menjadi KPB Pembantu dengan BAST No B. 32/BPPMHKP.ETK/ PL.510/II/2025		13.613.590.295
9	Sertifikat Kode H	Tranfer Masuk Sertifikat SMKHP dari Sekretariat BPPMHKP BAST No 4956/BPPMHKP1/P L520/X/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 (kode H.100 eksemplar)	100	1.102.500

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung TA 2024			
No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			
2.			
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			
Jumlah			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir Rp
18.620.519.622*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.620.519.622 dan Rp 10.805.679.021

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang mengakibatkan perubahan saldo yang disajikan pada neraca

.

F.1 Pengungkapan Lainnya

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan keuangan Stasiun KIPM Pontianak dan anak satker Balai KIPM Entikong

F.2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional TA. 2025

Stasiun PPMHKP Pontianak pada tahun 2025 melaksanakan program prioritas nasional. Pelaksanaanya melalui 14 Rincian Output adapun rinciannya sebagai berikut :

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EC 7010 PDD '002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	10000000	8412000	84,12	1	1	Lembaga	100	
EC 7010 PDD '001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25000000	0	0	1	1	Lembaga	100	Pagu Anggaran terblokir
EC 7010 PBR '001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	95000000	57790000	60,83	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	
EC 7010 ABR '001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2000000	0	0	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	Pagu Anggaran terblokir
WA 3987 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	110688000	0	0	1	1	Dokumen	100	Pagu Anggaran terblokir
EC 3989 PDC '002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	130000000	1860000	1,43	16	16	produk	100	
EC 3989 PDF '002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	95000000	3840000	4,04	10	10	Lembaga	100	
EC 3989 QIC '002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20000000	0	0	12	12	Lembaga	100	
WA 3987 EBA 994	Layanan Perkantoran	7305227000	4004384046	54,82	1	1	Layanan	100	
EC 7010 DCC '001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	8500000	0	0	1	1	Kegiatan	100	
WA 3987 EBA 962	Layanan Umum	214480000	58671581	27,36	1	1	Layanan	100	
EC 7010 QIA '001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	8500000	0	0	1	1	Produk	100	
WA 3987 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	43792000	0	0	1	1	Dokumen	100	
EC 3989 BIA '001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	5000000	0	0	1	1	Produk	100	

F.3. Pengungkapan Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Pada DIPA Stasiun PPMHKP Pontianak Tahun 2025 tidak terdapat tagging Tematik

F.4. Pengungkapan Capaian Output Strategis Lainnya

Selama periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Stasiun PPMHKP Pontianak adalah sebagai berikut :

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN / Tematik	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume	Progres Capaian Ouput
1	3990.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	PN	18.000.000	16.671.000	92.62%	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
	Jumlah			18.000.000	16.671.000				

LAPORAN PENYUSUTAN BMN PER 31 DESEMBER 2025

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG						SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE		URAIAN					KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
									SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1		2				3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111		Tanah					4.903,	7.817.715.120,	0,	0,	0,	7.817.715.120,
20101		TANAH PERSIL				-	4.903,	7.817.715.120,	0,	0,	0,	7.817.715.120,
132111		Peralatan dan Mesin					933,	8.340.565.520,	(4.130.008.495,)	(4.001.513.090,)	(8.131.521.585,)	209.043.935,
30103		ALAT BANTU				-	2,	2.880.000,	0,	(1.028.570,)	(1.028.570,)	1.851.430,
30201		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR				-	21,	1.576.874.505,	(747.089.200,)	(829.785.305,)	(1.576.874.505,)	0,
30302		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN				-	1,	6.995.000,	0,	(6.995.000,)	(6.995.000,)	0,
30303		ALAT UKUR				-	10,	15.345.000,	(1.835.000,)	(13.510.000,)	(15.345.000,)	0,
30401		ALAT PENGOLAHAN				-	11,	35.150.000,	(27.150.000,)	(8.000.000,)	(35.150.000,)	0,
30501		ALAT KANTOR				-	174,	608.757.534,	(200.735.800,)	(403.029.734,)	(603.765.534,)	4.992.000,
30502		ALAT RUMAH TANGGA				-	493,	1.824.843.690,	(653.498.700,)	(1.147.636.790,)	(1.801.135.490,)	23.708.200,
30601		ALAT STUDIO				-	28,	214.645.173,	(156.596.330,)	(58.048.843,)	(214.645.173,)	0,
30602		ALAT KOMUNIKASI				-	12,	33.606.400,	(18.049.900,)	(15.556.500,)	(33.606.400,)	0,
30603		PERALATAN PEMANCAR				-	3,	367.112.002,	0,	(312.605.407,)	(312.605.407,)	54.506.595,
30701		ALAT KEDOKTERAN				-	3,	5.499.000,	(45.544.000,)	40.045.000,	(5.499.000,)	0,
30801		UNIT ALAT LABORATORIUM				-	77,	1.875.376.820,	(1.136.992.063,)	(719.593.853,)	(1.856.585.916,)	18.790.904,
30802		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR				-	2,	291.378.000,	0,	(232.280.865,)	(232.280.865,)	59.097.135,
30803		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA				-	2,	233.144.600,	(226.445.600,)	(4.689.300,)	(231.134.900,)	2.009.700,
30804		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN				-	2,	366.570.000,	(366.570.000,)	0,	(366.570.000,)	0,
30806		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				-	2,	10.200.000,	(8.014.286,)	(1.457.143,)	(9.471.429,)	728.571,
30808		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI				-	2,	279.790.500,	(224.400.000,)	(38.242.875,)	(262.642.875,)	17.147.625,
31001		KOMPUTER UNIT				-	38,	371.958.460,	(185.478.137,)	(165.571.798,)	(351.049.935,)	20.908.525,
31002		PERALATAN KOMPUTER				-	46,	187.273.836,	(131.609.479,)	(50.361.107,)	(181.970.586,)	5.303.250,
31901		PERALATAN OLAH RAGA				-	4,	33.165.000,	0,	(33.165.000,)	(33.165.000,)	0,
133111		Gedung dan Bangunan					13,	11.673.420.090,	(781.810.883,)	(1.238.195.626,)	(2.020.006.509,)	9.653.413.581,
40101		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				-	9,	9.906.554.960,	(755.728.730,)	(989.905.994,)	(1.745.634.724,)	8.160.920.236,
40102		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL				-	2,	652.114.181,	0,	(97.817.130,)	(97.817.130,)	554.297.051,
40401		TUGUTANDA BATAS				-	2,	1.114.750.949,	(26.082.153,)	(150.472.502,)	(176.554.655,)	938.196.294,
134111		Jalan dan Jembatan					965,	837.129.000,	0,	(657.570.414,)	(657.570.414,)	179.558.586,

50101	JALAN	-	965,	837.129.000,	0,	(657.570.414,)	(657.570.414,)	179.558.586,
134112	Irigasi		1,	99.625.000,	(22.415.625,)	(2.490.625,)	(24.906.250,)	74.718.750,
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1,	99.625.000,	(22.415.625,)	(2.490.625,)	(24.906.250,)	74.718.750,
134113	Jaringan		3,	375.319.000,	(57.996.675,)	(27.211.190,)	(85.207.865,)	290.111.135,
50402	JARINGAN LISTRIK	-	3,	375.319.000,	(57.996.675,)	(27.211.190,)	(85.207.865,)	290.111.135,
135121	Aset Tetap Lainnya		17,	138.196.000,	0,	0,	0,	138.196.000,
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	17,	138.196.000,	0,	0,	0,	138.196.000,
JUMLAH			6.835,	29.281.969.730,	(4.992.231.678,)	(5.926.980.945,)	(10.919.212.623,)	18.362.757.107,

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK 567538

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	141,100,000	141,593,819	493,819	100	150,480,000	178,962,580	(28,482,580)	119
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	141,100,000	141,593,819	493,819	100	150,480,000	178,962,580	(28,482,580)	119
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	141,100,000	141,593,819	493,819	100	150,480,000	178,962,580	(28,482,580)	119
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,928,661,000	7,486,339,463	(442,321,537)	94	5,360,933,000	5,185,856,523	175,076,477	97
1. Belanja Pegawai	4,276,892,000	4,191,268,201	(85,623,799)	98	2,803,855,000	2,688,060,723	115,794,277	96
2. Belanja Barang	3,651,769,000	3,295,071,262	(356,697,738)	90	2,557,078,000	2,497,795,800	59,282,200	98
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK 567538

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,928,661,000	7,486,339,463	(442,321,537)	94	5,360,933,000	5,185,856,523	175,076,477	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala SKIPM Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.
NIP 197701242005021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

**SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	18,202,067	0	18,202,067	0.00
Piutang Bukan Pajak	533,710	193,819	339,891	175.37
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,669)	(969)	(1,700)	175.44
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	531,041	192,850	338,191	175.36
Persediaan	254,630,336	29,937,275	224,693,061	750.55
JUMLAH ASET LANCAR	273,363,444	30,130,125	243,233,319	807.28
ASET TETAP				
Tanah	7,817,715,120	6,282,017,000	1,535,698,120	24.45
Peralatan dan Mesin	8,340,565,520	4,289,080,696	4,051,484,824	94.46
Gedung dan Bangunan	11,673,420,090	4,799,029,983	6,874,390,107	143.25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,312,073,000	379,944,000	932,129,000	245.33
Aset Tetap Lainnya	138,196,000	38,082,000	100,114,000	262.89
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,919,212,623)	(4,992,231,678)	(5,926,980,945)	118.72
JUMLAH ASET TETAP	18,362,757,107	10,795,922,001	7,566,835,106	70.09
JUMLAH ASET	18,636,120,551	10,826,052,126	7,810,068,425	72.14
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,600,929	20,373,105	(4,772,176)	(23.42)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,600,929	20,373,105	(4,772,176)	(23.42)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,600,929	20,373,105	(4,772,176)	(23.42)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,620,519,622	10,805,679,021	7,814,840,601	72.32
JUMLAH EKUITAS	18,620,519,622	10,805,679,021	7,814,840,601	72.32
JUMLAH EKUITAS	18,620,519,622	10,805,679,021	7,814,840,601	72.32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,636,120,551	10,826,052,126	7,810,068,425	72.14

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala SKIPM Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.

NIP 197701242005021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	141,400,000	159,750,000	(18,350,000)	(11.487)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	141,400,000	159,750,000	(18,350,000)	(11.487)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	141,400,000	159,750,000	(18,350,000)	(11.487)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,190,734,491	2,687,866,904	1,502,867,587	55.913
Beban Persediaan	160,655,863	314,626,440	(153,970,577)	(48.938)
Beban Barang dan Jasa	2,030,927,763	1,377,246,878	653,680,885	47.463
Beban Pemeliharaan	791,410,713	428,465,676	362,945,037	84.708
Beban Perjalanan Dinas	94,609,123	386,512,270	(291,903,147)	(75.522)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	550,455,497	293,813,575	256,641,922	87.349
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,669	969	1,700	175.439
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,818,796,119	5,488,532,712	2,330,263,407	42.457
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,677,396,119)	(5,328,782,712)	(2,348,613,407)	44.074
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	2,182,250	(2,182,250)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	2,876,000	(2,876,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	693,750	(693,750)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3,287,395)	15,942,700	(19,230,095)	(120.62)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	15,942,700	(15,942,700)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,287,395	0	3,287,395	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,287,395)	18,124,950	(21,412,345)	(118.137)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,680,683,514)	(5,310,657,762)	(2,370,025,752)	44.628
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,680,683,514)	(5,310,657,762)	(2,370,025,752)	44.628

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala SKIPM Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.

NIP 197701242005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

**SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,805,679,021	12,048,214,533	(1,242,535,512)	(10.31)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,680,683,514)	(5,310,657,762)	(2,370,025,752)	44.63
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	969	1,969	(1,000)	(50.79)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	969	1,969	(1,000)	(50.79)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,495,523,146	4,068,120,281	11,427,402,865	280.9
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,814,840,601	(1,242,535,512)	9,057,376,113	(728.94)
EKUITAS AKHIR	18,620,519,622	10,805,679,021	7,814,840,601	72.32

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala SKIPM Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.

NIP 197701242005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	18,202,067	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	533,710	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,669
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,156,296	0
0.0	117131	Bahan Baku	237,474,040	0
0.0	131111	Tanah	7,817,715,120	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,340,565,520	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,673,420,090	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	837,129,000	0
0.0	134112	Irigasi	99,625,000	0
0.0	134113	Jaringan	375,319,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	138,196,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,131,521,585
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,020,006,509
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	657,570,414
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	24,906,250
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	85,207,865
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,600,929
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,486,339,463
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	141,593,819	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,150,777,502
0.0	391111	Ekuitas	0	10,805,679,021
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	969
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	141,400,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,077,968,460	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,408	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70,802,880	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	26,508,824	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	26,840,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,889,358	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	60,434,490	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	170,928,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	36,755,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	270,166,633	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,716	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	18,879,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,297,650	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12,120,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,413,390	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	62,467,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	9,285,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	359,333,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	85,353,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,509,543,330	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	344,048,872	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	792,783,283	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	47,794,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78,220,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	146,071,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,360,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	46,419,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	146,422,948	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,405,401	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,397,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	20,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	739,053,731	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	367,360,666	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,784,233	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	88,609,123	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200,289,328	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	253,778,660	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	84,498,194	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,490,625	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,398,690	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	126,444,358	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,515,814	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,750,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	34,211,505	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	2,669	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3,287,395	0
JUMLAH			37,519,013,176	37,519,013,176

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala SKIPM Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.

NIP 197701242005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,486,339,463
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	141,593,819	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	141,400,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	193,819
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,077,968,460	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,408	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,802,880	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,508,824	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	26,840,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,889,358	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60,434,490	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	170,965,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	36,755,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	270,166,633	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,716	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	18,879,480	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,297,650	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,120,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,413,390	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	62,467,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	9,285,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	359,333,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	85,353,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,509,996,028	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	344,092,884	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	813,794,360	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	47,794,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,220,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	146,071,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,360,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	46,419,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	124,113,234	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	236,302,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	148,031,906	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,478,609	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	11,678,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	20,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (567538) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	739,053,731	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	367,360,666	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,784,233	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88,609,123	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0
JUMLAH			7,627,933,282	7,627,933,282

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala SKIPM Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI., M.A.P.

197701242005021001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (567538)Stasiun KIPM Pontianak
Kode dan Nama UAPPAW : (13)Kalimantan Barat
Kode dan Nama Eselon-1 : (13) BPPMHKP
Kode dan Nama K/L : (032)Kementerian Kelautan dan Perikanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun			Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak

8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		v	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya

7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		v	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		v	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		v	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		v	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		v	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak

1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		v	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	8,150,777,502		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		v	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual		v	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		v	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	v		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya

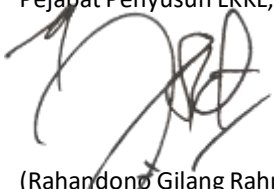
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		v	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		v	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		v	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		v	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		v	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		v	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		v	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,		v	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		v	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,		v	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan		v	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		v	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		v	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca		v	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		v	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		v	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan		v	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Rahandono Gilang Rahmanto)
NIP.198710212010121002

Pontianak, 11 Januari 2026
Penelaah,



(Jimmy V. Elwaren)
NIP.197701242005021001